

**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN MUTU
PROFESIONALITAS GURU DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU**

¹Jernilan

*¹ Mahasiswa Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu
Jernilanmpd287@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang Kebijakan Kepala Madrasah dalam mengembangkan mutu profesionalitas guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bengkulu. Lebih detail penelitian ini menyajikan deskripsi perumusan masalah tentang bagaimana perumusan, pengorganisasian, kinerja, evaluasi, dan hasil implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah dalam pengembangan mutu profesionalitas guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu.

Adapun metode yang ditempuh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini ditempuh dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam hal ini, peneliti melaksanakan wawancara kepada Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Guru, para Guru, Pengawas Pendidikan, dan Ketua Komite Madrasah. Hasilnya kemudian dianalisis dengan pendekatan manajemen pendidikan Islam.
Kata Kunci : Kebijakan Kepala Madrasah

Abstract

This study aims to explore the policy of Madrasah Principal in developing the quality of teacher professionalism in State Senior Islamic School 1 Kota Bengkulu. This research will present description of problem formulation in this research that is how policy conducted by Head of Madrasah in developing of professional quality of teachers at Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan on of famous Islamic schools in North Sumatera. The issues in this writing are what are the formulation, organization, application and evaluation of Headmaster Policy of Islamic School in Increasing the Teacher Professionality at State Senior Islamic School 1 Kota Bengkulu.

To explain the main issue in this writings, I have to observe and interview the moeslem population. Data has been collected will be explained detailly and analysed by Islamic education management.

Keywords: Explore the policy

PENDAHULUAN

Keberadaan pendidikan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan suatu bangsa di segala bidang. Untuk mencapai hal tersebut, keunggulan dari kualitas pendidikan suatu bangsa sangat menentukan. Dalam konteks ini dapat dikatakan, majunya pendidikan memiliki korelasi yang positif terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan yang berhasil diraih suatu bangsa. Sebaliknya, rendahnya kualitas pendidikan sangat mempengaruhi pada rendahnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini cukup beralasan, sebab pendidikan merupakan institusi yang mengelola dan mencetak peserta didik menjadi generasi yang handal dari aspek mental, moral, spiritual, dan skill (keterampilan) untuk dapat mengisi pembangunan bangsanya. Jika pendidikan yang dijalankan mengalami kegagalan, sulit dibayangkan bangsa tersebut dapat mencapai kemajuan.

Bila dimelihat dengan kondisi objektif guru yang bertugas pada berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, maka kualitas guru di Indonesia masih jauh dari peringkat kualitas yang dimiliki oleh guru-guru di negara-negara maju tersebut. Mutu profesionalitas guru di Indonesia masih perlu dipertanyakan, mulai dari permasalahan kriteria perekrutan guru, kurangnya pelatihan yang kontinu terutama bagi guru-guru yang bertugas di daerah luar kota, pedalaman dan terpencil, latar belakang pendidikan menjadi guru, penguasaan terhadap materi bahan ajar, mengelola proses

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugastugas bimbingan, hingga kepemilikan terhadap sertifikat pendidik. (Sudarwan Danim)

Adapun jenis kegiatan yang dapat diikuti guru untuk peningkatan mutu profesionalitasnya melalui jalur pendidikan dan pelatihan, antara lain adalah *inhouse* training, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh/pertukaran guru, pelatihan berjenjang dan khusus, kursus singkat di perguruan tinggi, pembinaan internal oleh sekolah, dan pendidikan lanjut. Sedangkan kegiatan yang dapat diikuti guru di luar jalur pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), diskusi masalah pendidikan, seminar, *workshop*, penelitian, penulisan buku/bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan karya teknologi/karya seni (Danim, 2011)

Pengembangan profesionalitas guru sesungguhnya terletak pada kemauan dan kemampuan guru untuk mengembangkan dirinya ketika mereka sudah menduduki jabatan guru. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru profesional, dan berkompeten dalam mendidik (Mahpudz, 2014). Guru yang profesional ditandai dengan perolehan sertifikasi yang diperoleh melalui evaluasi dan pernyataan kelayakan kompetensi seseorang untuk melakukan tugas yang menuntut keahlian tertentu, baik dari segi akademik maupun terapannya dalam konteks otentik bidang tugasnya di lapangan. (Wukir, 2008).

Meskipun telah tersedia berbagai bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan mutu profesionalitas guru melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) atau kegiatan-kegiatan lainnya di luar diklat, namun dalam hal ini peneliti memandang penting untuk melihat aspek lain yang juga sangat mempengaruhi peningkatan dan pengembangan mutu profesionalitas guru di madrasah. Aspek tersebut adalah kebijakan yang diambil oleh kepala madrasah dalam mendongkrak bangkitnya kualitas guru secara profesional pada institusi yang dipimpinnya. Kepala Madrasah merupakan salah satu SDM yang termasuk ruang lingkup garapan administrasi pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif dalam konteks mikro, peran Kepala Madrasah yang profesional sangat penting. Karena itu, kinerja Kepala Madrasah harus ditingkatkan. Hanya Kepala Madrasah yang memiliki kinerja baik, tujuan pendidikan secara produktif dapat tercapai. (Suhardiman)

Efektivitas kepemimpinan Kepala Madrasah bergantung kepada kemampuan bekerja sama dengan seluruh warga madrasah, serta kemampuannya mengendalikan sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Demikian pula halnya dengan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Aliyah, beban yang ditanggungnya semakin berat, di samping keberadaannya secara historis sebagai lembaga dakwah dan akademik, bahkan dituntut lebih dari itu menjadi lembaga profesional untuk mengembangkan kegiatan akademik dan keterampilan tertentu sebagai bekal dari peserta didik dalam menghadapi era persaingan global.

Kemampuan Kepala Madrasah untuk memimpin guru sangat menarik untuk diteliti. Pada satu sisi, semua kebijakan Kepala Madrasah diatur dengan regulasi, di lain pihak dia juga mempunyai kewenangan untuk berinovasi dan berkreasi sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang berkualitas. Lingkungan pendidikan yang berkualitas tidak akan lepas dari guru yang secara langsung berhadapan dengan siswa. Guru yang berkualitas akan mampu menghasilkan peserta didik yang berprestasi, mandiri, berkarakter, dan juga berinovasi. Karena itu, untuk mewujudkan guru yang profesional sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas harus dipimpin oleh Kepala Madrasah yang memiliki kebijakan yang bersifat inovatif dalam memimpin lembaga pendidikan. Dalam hal ini Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu sangat layak diteliti dengan kemampuan manajerial Kepala Madrasah dalam memimpin guru dan siswanya, sehingga madrasah ini dapat meraih prestasi lokal dan nasional.

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Kepala Madrasah dan Pengembangan Profesionalitas Guru

1. Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

James E. Anderson lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi: (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*authoritative*). Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya Said Zainal Abidin dalam Dedy Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni (1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif atau pun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; (2) Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; (3) Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Pada sisi lain, William Dunn dalam Sahya Anggara mengemukakan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu (1) Saling kebergantungan; kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah; (2) Subyektivitas; kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefenisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif; (3) Sifat bantuan; masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial; (4) Dinamika masalah kebijakan; cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Berdasarkan empat ciri pokok kebijakan yang dipaparkan Dunn dapat dipahami bahwa kebijakan mengandung berbagai pertimbangan, terlebih jika menyangkut masyarakat banyak, artinya dapat berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan prinsip demokrasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipaparkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintahan dan organisasi. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak

penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting sebuah organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Dengan demikian dalam sebuah kebijakan terdapat penentuan tenaga (staffing), persyaratan tenaga (requirement), dan pembinaan.

2. Tahap-Tahap Kebijakan

Dalam sebuah kebijakan terdapat beberapa tahapan sehingga sampai pada sebuah kebijakan tertentu. Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan.

Agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik, ada 5 (lima) tahapan yang harus dilalui, yakni (1) penyusunan agenda; (2) formulasi kebijakan; (3) adopsi kebijakan; (4) implementasi kebijakan; dan (5) evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tahap-tahap kebijakan dimaksud dapat dideskripsikan berikut ini:

1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini ditinjau dari tujuan penelitian adalah *descriptive research*. Pada penelitian *descriptive research*, pusat perhatian adalah untuk menggambarkan keadaan yang sedang diteliti secara seksama. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perumusan, pelaksanaan, kinerja, dan evaluasi kebijakan pengembangan mutu profesionalitas guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu.

Jenis penelitian yang dipergunakan untuk mencapai tujuan di atas adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Pada penelitian ini informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan *interview* terarah, yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Burhan Bungin, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi suatu objek penelitian, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi atau variabel tertentu. Penelitian ini ditinjau dari data yang diperoleh dan tempat penelitian adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti melakukan penelitian tentang perumusan, pelaksanaan, kinerja, dan evaluasi kebijakan pengembangan mutu profesionalitas guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu.

Adapun metode kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian studi yang menggunakan metode kualitatif menggunakan khazanah dari fenomena empiris, seperti studi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

kasus, pengalaman pribadi, *life history*, wawancara, *observasi*, sejarah, interaksi, teks visual ataupun konten pesan yang menggambarkan rutinitas dan problematika serta makna kehidupan individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam. Karena itu, dalam proses penelitian ini, mulai dari persiapan penyusunan proposal penelitian, kajian pustaka, penentuan metodologi penelitian, pemaparan hasil penelitian, hingga monitoring dan evaluasi, digunakan perspektif Ilmu Manajemen Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Islam.

HASIL PENELITIAN

Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya mutu profesionalitas guru, yaitu :

1. Rendahnya kualitas pendidikan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul mampu berdaya saing, mempunyai etos kerja yang tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kualitas guru di Indonesia masih jauh dari peringkat kualitas yang dimiliki oleh guru-guru di negara maju.
4. Kriteria perekrutan guru
5. Kurangnya pelatihan guru
6. Kurangnya penguasaan bahan ajar
7. Kurangnya pengelolaan proses pembelajaran
8. Kurangnya pengelolaan siswa
9. Kurangnya melakukan tugas-tugas bimbingan
10. Belum memadainya guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik
11. Masih banyak guru yang belum disertifikasi
12. Guru yang memiliki sertifikat pendidik profesional belum secara lanjut untuk meningkatkan kembali mutu profesionalnya
13. Sumberdaya tenaga pendidik sudah banyak yang memiliki latar belakang strata 2 dan ada beberapa orang sedang melaksanakan strata 3.
14. MAN 1 Kota Bengkulu sudah ditetapkan sebagai madrasah model pada tahun 1998.
15. Semua kebijakan kepala madrasah diatur dengan regulasi dan di lain pihak mempunyai kewenangan untuk berinovasi dan berkreasi, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang berkualitas yaitu guru.
16. Guru yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berprestasi, mandiri, berkarakter dan berprestasi.

Akan tetapi, dengan adanya kebijakan kepala madrasah ada beberapa peningkatan, berkenaan dengan peningkatan mutu profesionalitas guru, antara lain :

1. Aspek kesiapan guru dalam menyusun rencana dan program pembelajaran RPP dalam aktifitas pembelajaran
2. Menguasai materi yang diajarkan
3. Kedisiplinan dalam kehadiran tugas mengajar
4. Tingkat kehadiran dalam menghadiri rapat dinas, rapat MGMP, diklat dan workshop
5. Latar belakang pendidikan guru yang mengajar
6. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru ke jenjang S2.
7. Peningkatan jumlah guru yang mengikuti studi banding ke sekolah-sekolah unggul walaupun di dalam kota.
8. Prestasi guru dalam membimbing siswa yang sering keluar sebagai juara.

Semua hasil yang diperoleh tersebut tentu saja di latar belakang oleh kebijakan untuk mengembangkan mutu profesionalitas guru yang digulirkan oleh kepala madrasah, dan didukung oleh motivasi serta kemauan yang kuat dari guru-gurunya untuk berpacu dalam meningkatkan kualitas diri mereka menjadi guru profesional, kebijakan yang digulirkan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

kepala madrasah, ciri berhasil mencapai target yang di diharapkan, karena di dukung oleh tiga faktor utama, yakni :

1. Adanya program dari kebijakan yang di gulirkan
2. Di dukung dan diimplementasikan oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Adanya komitmen yang kuat dari semua komponen madrasah untuk berbenah diri dan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Mulai dari kepala madrasah, wakil kepala kepala tata usaha, dewan guru, pengawas, komite madrasah. Semua komponen ini terlihat saling kerjasama dan bersinergi dalam memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan mutu profesionalitas guru di lingkungan madrasah.

PENUTUP

Untuk mewujudkan manusia yang berkualitas tersebut, lembaga pendidikan dituntut ikut bertanggung jawab terutama dalam menghasilkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Karena itu dibutuhkan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi berbagai tantangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ini.

Keberadaan Kepala Madrasah sangat strategis khususnya di lembaga pendidikan. Kepala Madrasah berada pada garis terdepan dalam menjamin mutu Madrasah di bawah tanggung jawabnya. Bila ditinjau dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas madrasah, maka meningkat pula tuntutan terhadap kepemimpinan Kepala Madrasah. Dalam hal ini Kepala Madrasah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai managerial dan *leader*. Sebagai pemimpin pendidikan di madrasah, Kepala Madrasah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk mengembangkan seluruh sumber daya di madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. E. Public Policy Making. New York: Holt Rinehart and Winston, 1984.
- Anggara, Sahya. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Danim, Sudarwan. Pengembangan Profesi Guru: Dari Prajabatan, Induksi, ke Profesional Madani. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. Public Administration: An Action Orientation. Boston: Wadsworth, 2009.
- Hornby, AS. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current Englis. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Mahpudz, Asep. 'Analisis Kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru dalam rangka Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah' dalam Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Vol. 7, No. 1 April 2014.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Sutikno, M.Sobry. Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul: Tinjauan Umum dan Islami, Lombok: Holistika, 2012.
- Suhardiman, Budi. Studi Pengembangan Kepala Sekolah: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Wukir R., 'Kajian terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam rangka Meningkatkan Mutu Guru' dalam Lex Jurnalica Vol. 5 No. 3, Agustus 2008.
- Yusutria, 'Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia' dalam Jurnal Curricula Kopertis Wilayah X, Vol. 2, No. 1 Tahun 2017.